

PROSES BISNIS

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BATU

REGULASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

VISI DAN MISI

VISI :
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA
BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA
INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA
SAING DAN SEJAHTERA

MISI :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal

Meningkatkan Pembangunan, Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Akuntabel Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Profesional

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA



TUJUAN :
Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel

- SASARAN :**
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah
 2. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah

TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS :

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan

FUNGSI :

1. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah
2. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah
3. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TUJUAN

Opini BPK

INDIKATOR SASARAN

1. Persentase OPD yang menyusun Laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu
2. Persentase peningkatan PAD dari sektor pajak

SKEMA PROSES BISNIS



SUPPLIER

- Kemenkeu
- Pemprov
- Masyarakat



INPUT

- Dana Transfer
- PAD
- Pembiayaan



PROSES BISNIS



OUTPUT

- Akuntabilitas Keuangan
- Peningkatan PAD



CUSTOMER

- Kemenkeu
- Kemendagri
- SKPD
- Masyarakat

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

1. Pengelolaan Kinerja
2. Kepatuhan Internal
3. Pengelolaan Risiko

PROSES BISNIS INTI

1. Penganggaran
2. Penatausahaan
3. Pengelolaan Aset
4. Pelaporan Keuangan

PROSES BISNIS PENDUKUNG

1. Peraturan perundang-undangan
2. SDM (kompetensi pegawai)
3. Ketersediaan sarana dan prasarana
4. RKPD
5. KUA-PPAS
6. Integrasi TI (penerapan e-gov)

TUJUAN

STAKEHOLDERS

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Walikota | 5. Kemendagri |
| 2. DPRD | 6. Pemprov |
| 3. BPK | 7. Masyarakat |
| 4. Kemenkeu | |

HASIL / OUTPUT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. APBD | Pertanggungjawaban |
| 2. Laporan Keuangan | 4. Penerimaan Pajak |
| 3. Perda | |

MANFAAT / OUTCOME

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. APBD tepat waktu | 3. Peningkatan realisasi PAD |
| 2. Opini BPK WTP | |

Proses Bisnis Manajemen

Pengelolaan Kinerja

- Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja DKP selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal

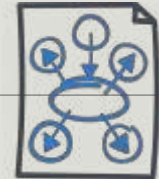
- Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan Resiko

- memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



Evaluasi Kinerja



Perencanaan Kinerja



Pengelolaan Kinerja



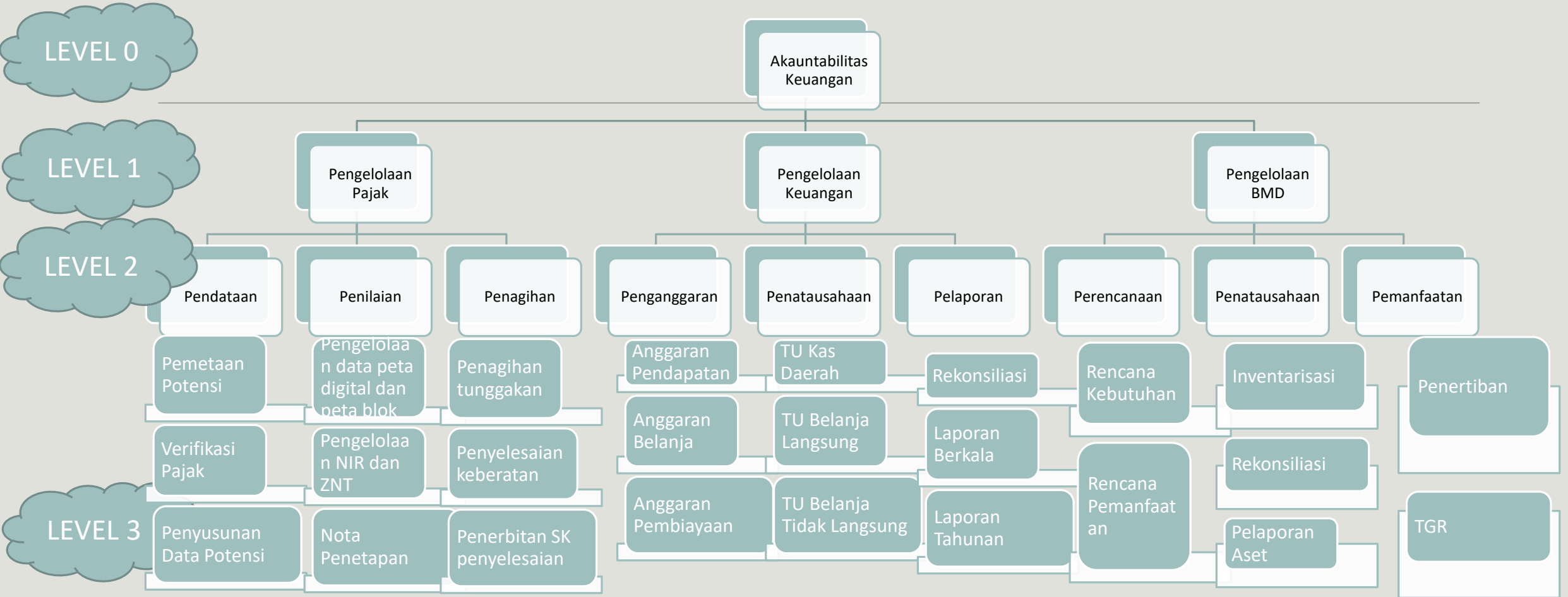
Pelaporan Kinerja



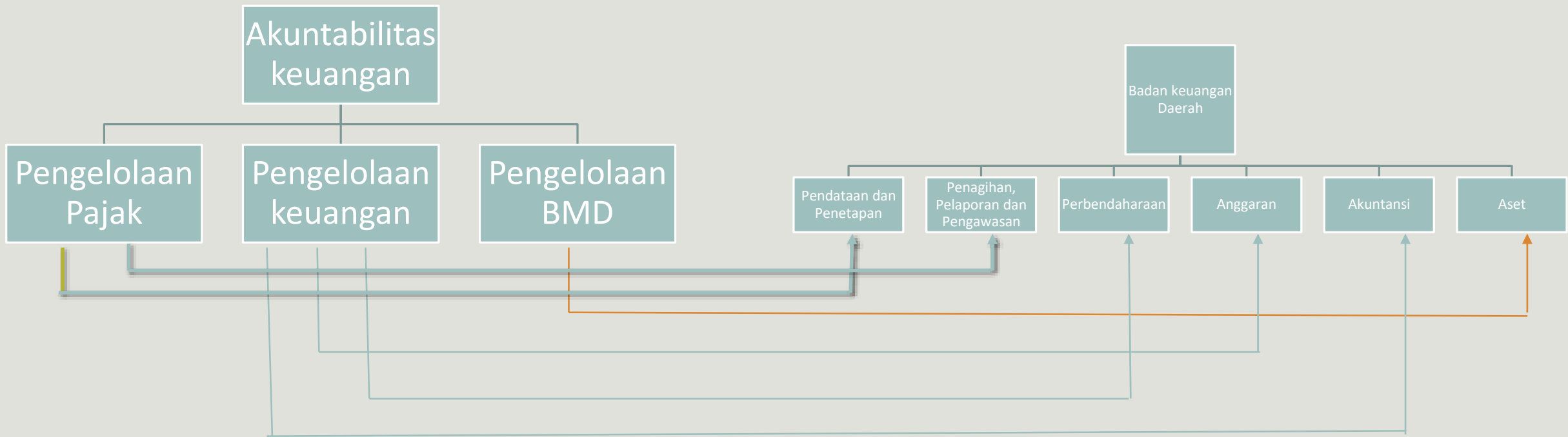
Pengukuran Kinerja



PROSES BISNIS INTI

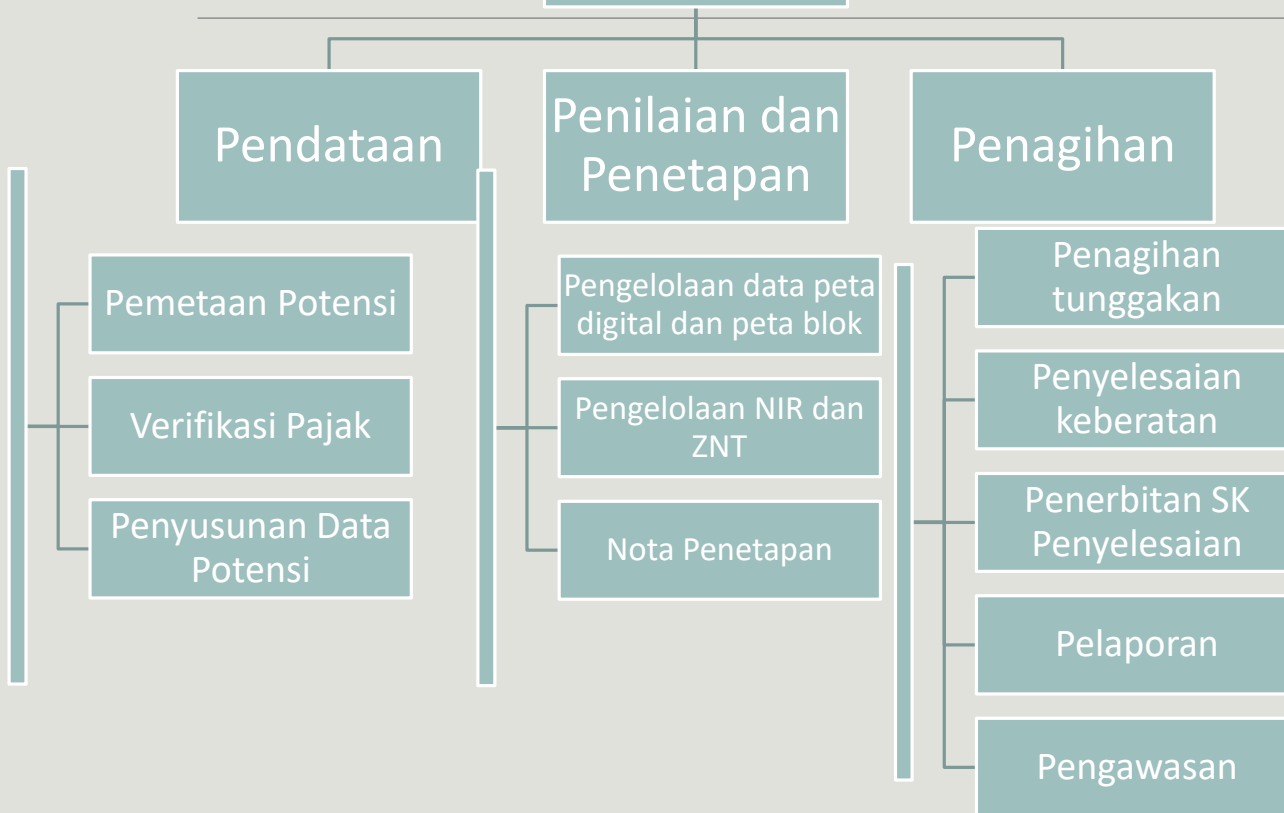


PROSES BISNIS vs STRUKTUR ORGANISASI



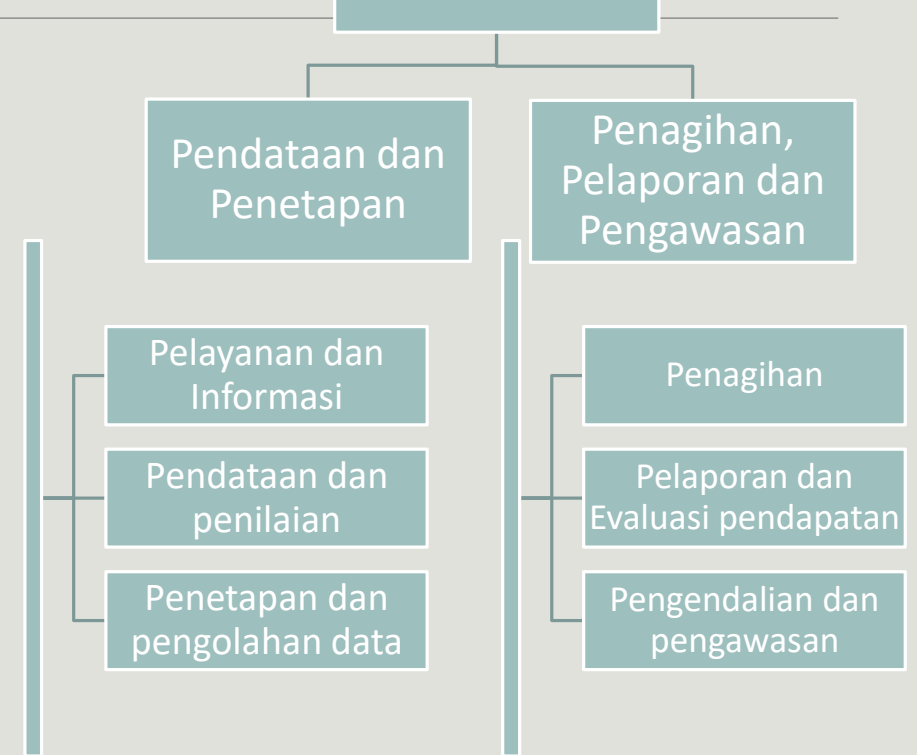
PROSES BISNIS

Pengelolaan Pajak



STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan Pajak



Struktur Organisasi masih belum mencerminkan proses bisnis yang ada. 3 level sub proses hanya diakomodir ke dalam 2 bidang. Masing-masing bidang terdiri dari 3 sub bidang yang masih belum menggambarkan proses bisnis yang dijalankan oleh OPD

PROSES BISNIS

Pengelolaan Keuangan

Penganggaran

Anggaran Pendapatan

Anggaran Belanja

Anggaran Pembiayaan

Penatausahaan

TU Kas Daerah

TU Belanja Langsung

TU Belanja Tidak Langsung

Pelaporan

Rekonsiliasi

Laporan Berkala

Laporan Tahunan

STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan Keuangan

Bidang Anggaran

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan

Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran

Bidang Perbendaharaan

Belanja Langsung

Belanja Tidak langsung

Pengelolaan Kas

Bidang Akuntansi

Pelaporan Belanja

Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan

Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi

Proses bisnis sesuai SO

